

TESIS

STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN TAMBORA, PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun Oleh:

NAMA : RIYA IRAWATI
NPM : 2242021007
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Riya Irawati
NPM : 2242021007
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis : Strategi Collaborative Governance Dalam Penataan Permukiman
(Bahasa Indonesia) Kumuh Di Tambora, Provinsi DKI Jakarta
Judul Tesis : Collaborative Governance Strategy in Slum Management in
(Bahasa Inggris) Tambora Area of DKI Jakarta

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si)

Pembimbing II



(Dr Firman Hadi Rivai, MPA)

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RIYA IRAWATI
NPM : 2242021007
PROGRAM : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA /
STUDI/KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH
JUDUL TUGAS AKHIR : STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM
PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN
TAMBORA, PROVINSI DKI JAKARTA

Telah mempertahankan tesis di hadapan
Tim Penguji Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara
Politeknik STIA LAN Jakarta

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Juli 2024
Pukul : 13.00 s.d 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA

Sekretaris : Dr. Asropi M.Si

Anggota : Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D

Pembimbing 1 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

Pembimbing 2 : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA



**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Riya Irawati
NPM	: 2242021007
Jurusan	: Administrasi Publik
Program studi	: Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	: Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun dengan judul “*Strategi Collaborative Governance* Dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Tambora, Provinsi DKI Jakarta” merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tesis ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun,

Jakarta, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



(Riya Irawati)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Strategi *Collaborative Governance* Dalam Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Tambora, Provinsi DKI Jakarta”.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, atas data dan informasi yang telah diberikan.
2. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA dan Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, ST., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian ini.
3. Bapak Dr. Asropi, M.Si, Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, MA, dan Ibu Arifiani Widjayanti, SP., M.Si., Ph.D, selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan berbagai saran dan masukan guna meningkatkan hasil dari penelitian ini.
4. Para Narasumber Bapak Sapto, Ibu Fely, Bapak Budi, Ibu Elfi, bapak Agus, Lurah Duri Selatan, Lurah Jembatan Besi, Lurah Krendang, Dosen ITB Bapak Sugiyantoro, dan masyarakat Tambora yang telah berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penelitian ini dan memberikan wawasan dan perspektif yang sangat berharga.
5. Seluruh Dosen Pengajar pada Magister Manajemen Pembangunan Daerah atas dedikasinya yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama menempuh perkuliahan dan Mbak Seha yang membantu proses administrasi dalam kelancaran selama masa perkuliahan.

6. Rekan-rekan Subdit Perkotaan Pak Laksito, Pak Gensly, Mas Dian, Cristlan, Elga, Ardi, Icha, Mba Catty, Alim, Ayu, Syamsu, Zaky, Pak Enjang dan Mas Yogi yang telah bekerja sama dan mendukung penulis dalam penyelesaian ijin belajar dan penelitian ini.
7. Kedua orangtua yang saya hormati Bapak As'ad dan Ibu Umi Salamah dan keluarga tercinta saya Mbak Aning, Mas Roni, Andi, Sinta, Bisma, Arthur dan Audrey atas doa, semangat, dukungan dan harapan yang tidak pernah putus.
8. Teman - teman sekelas MPD 2022 (Mbak Aini, Mbak Reny, Mbak Linda, Reza, Imam, Mas Lian, Mas Tomi, Mas Endang dan Pak Aji) atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan yang telah diberikan selama masa studi ini. Terima kasih atas inspirasi dan semangat yang selalu kalian bagikan.
9. Teman-teman seperjuangan dalam penyelesaian studi Ema, Erna, Karin, Mimi, Peny, Dwi, Farida, Reni, Dinda, Fina, Norma, dan Vika. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Dengan segala kerendahan hati, kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Jakarta, Agustus 2024

Riya Irawati

STRATEGI *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN TAMBORA, PROVINSI DKI JAKARTA

Riya Irawati

E-mail : riyaairawati@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRAK

Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 menyatakan bahwa hanya 48,48% rumah tangga yang telah memiliki rumah sendiri di Jakarta sepanjang 2021 sedangkan sisanya masih yang berstatus tidak tetap. Pemilihan wilayah studi didukung dengan adanya beberapa isu permasalahan diantaranya Tambora memiliki kepadatan tinggi sebanyak 49.841 jiwa/km², masuk ke dalam area miskin esktrim dan masih adanya permasalahan fisik lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penataan permukiman telah mengeluarkan program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative Implementation Program* (CIP). Program tersebut melibatkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, konsultan dan akademisi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Penelitian ini penting dilakukan untuk mencari penyelesaian dari pelaksanaan kolaboratif yang belum berjalan baik guna menyusun strategi penguatan kolaborasi dalam program CAP dan CIP di kawasan Tambora. Analisis penelitian dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor berdasarkan pendekatan Ansell dan Gash (2008), Edward DeSeve dan H. Moore (2009) dan Nabatchi dan Leighninger (2015) selanjutnya merumuskan dan memilih strategi terbaik menggunakan analisis IFE dan EFE, Analisa SWOT dan QSPM. Kesimpulan yang diambil yaitu belum optimalnya *collaborative governance* disebabkan oleh beberapa faktor yang belum berkinerja dengan baik yaitu faktor partisipasi publik, tata kelola *governance*, komitmen terhadap tujuan dan akses terhadap sumberdaya sedangkan faktor yang sudah baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Strategi optimalisasi *collaborative governance* dalam program CAP dan CIP yang dirumuskan diantaranya 1) Kemitraan, 2) Integrasi Kebijakan, 3) Komitmen Politik, 4) Peningkatan SDM dan 5) *Upgrade Program*.

Kata kunci: CAP dan CIP, *collaborative governance* dan strategi optimalisasi.

COLLABORATIVE GOVERNANCE STRATEGY FOR SLUM MANAGEMENT IN THE TAMBORA AREA OF *DKI* JAKARTA

Riya Irawati

E-mail : riyairawati@gmail.com

Politeknik STIA LAN Jakarta

ABSTRACT

Based on the 2021 data from the Central Statistics Agency (BPS), only 48.48% of households in Jakarta had their own houses, while the remainder were in irregular status. The selection of the study area is supported by several issues, including Tambora's high population density of 49,841 people per square kilometer, its classification as an area of extreme poverty, and ongoing physical, social, and economic environmental challenges in housing settlements. The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) to address the challenges in housing settlement management. These programs involve collaboration between the DKI Jakarta Provincial Government and the community, community groups, social institutions, consultants, and academics to improve the quality of slum settlements. The research is crucial for identifying solutions to improve collaborative implementation in the CAP and CIP programs within the Tambora area, aiming to develop effective strategies for strengthening collaboration. The analysis draws on approach frameworks by Ansell and Gash (2008), Edward DeSeve and H. Moore (2009), and Nabatchi and Leighninger (2015). The strategy formulation involves IFE and EFE, SWOT and QSPM analyses. The conclusion drawn is that the suboptimal collaborative governance is due to several factors that are not performing well, particularly public participation, governance management, commitment to purpose, and access to resources, while the factor that have performed well are transparency and accountability. To optimize collaborative governance, the following strategies have been formulated: 1) Strengthening partnerships, 2) Policy integration, 3) Political Commitment, 4) Enhancing human resources 5) and Program enhancement.

Keywords: CAP and CIP, collaborative governance and optimization strategy.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Metode Penelitian	53
B. Teknik Pengumpulan Data	54
C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	58
D. Lokus Penelitian	59
E. Prosedur Validasi Data	60
F. Instrumen Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
A. Gambaran Umum Kawasan Tambora.....	62
1. Kondisi Administrasi dan Geografis Kecamatan Tambora	62
2. Kondisi Permukiman Tambora.....	63
B. Hasil dan Analisa Penelitian.....	73
1. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kolaborasi	74
1.1 Faktor Partisipasi Masyarakat	74

a. Partisipasi masyarakat.....	74
b. Adanya forum dimana lembaga publik terlibat	78
1.2 Faktor Tata Kelola Pemerintahan	80
a. Tata Kelola	80
b. Pengaruh terhadap Keputusan (<i>Decision Making</i>).....	83
1.3 Faktor Komitmen Terhadap Tujuan	88
a. Komitmen terhadap tujuan.....	88
b. Hasil tepat sasaran	95
1.4 Faktor Transparansi dan Akuntabilitas	103
a. Transparansi dan akuntabilitas	103
b. Kepercayaan antar pihak	106
1.5 Faktor Akses Terhadap Sumberdaya	107
a. Agenda Waktu.....	107
b. Akses terhadap sumber daya keuangan dan teknis.	110
c. Teknologi dan inovasi	115
2. Strategi Optimalisasi <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penataan Permukiman Kumuh Melalui CAP dan CIP di Kawasan Tambora.....	120
2.1 Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> dan <i>Eksternal Factor Evaluation</i>	120
2.2 Matriks SWOT	128
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	146

POLITEKNIK
STIALAN
JAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 2. 2 Identifikasi Faktor-Faktor Collaborative Governance	43
Tabel 2. 3 Matriks IFE	48
Tabel 2. 4 Matriks EFE	48
Tabel 2. 5 Matriks QSPM	50
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	56
Tabel 4. 1 Tingkat Kekumuhan di Kawasan Permukiman Tambora	65
Tabel 4. 2 Identifikasi Kekumuhan Tambora Berdasarkan	67
Tabel 4. 3 Pelaksanaan CAP dan CIP di Kawasan Tambora.....	82
Tabel 4. 4 Rencana Kegiatan Pada CAP Kawasan Tambora.....	96
Tabel 4. 5 Pelaksanaan CIP Kawasan Tambora.....	100
Tabel 4. 6 Rekap Analisa Faktor - Faktor <i>Collaborative Governance</i>	118
Tabel 4. 7 Identifikasi Faktor Pendukung Dan Penghambat.....	120
Tabel 4. 8 Faktor Internal <i>Collaborative Governance</i>	122
Tabel 4. 9 Faktor Eksternal <i>Collaborative Governance</i>	122
Tabel 4. 10 Matriks Urgensi IFE.....	124
Tabel 4. 11 Matriks Urgensi EFE	124
Tabel 4. 12 Analisis Matriks IFE	125
Tabel 4. 13 Analisis Matriks EFE	126
Tabel 4. 14 Matriks SWOT Strategi <i>Collaborative Governance</i>	129
Tabel 4. 15 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM).....	138
Tabel 4. 16 Hasil QSPM	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Formula Strategi.....	46
Gambar 2. 2 Matriks IFE dan EFE	49
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir	52
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data Model	59
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kecamatan Tambora.....	63
Gambar 4. 2 Peta Permukiman Kumuh Kecamatan Tambora	66
Gambar 4. 3 (a) Konstruksi rumah yang terbuat dari kayu.....	68
Gambar 4. 4 (a) Kondisi rumah yang tidak mendapatkan pencahayaan alami	70
Gambar 4. 5 Kondisi ruko yang dijadikan tempat bisnis minuman keras	71
Gambar 4. 6 Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Tambora.....	72
Gambar 4. 7 (a) Kegiatan Pokmas mengerjakan mural 3D	74
Gambar 4. 8 Berita Acara Pembentukan Pokmas Kelurahan Jembatan Besi	75
Gambar 4. 9 Aktor – aktor dalam Program CAP dan CIP	89
Gambar 4. 10 Susunan Keanggotaan Gugus Tugas	92
Gambar 4. 11 Bagan Metode CAP Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman .	108
Gambar 4. 12 (a) Kondisi rumah warga yang hangus terbakar.....	113
Gambar 4. 13 Informasi Penggunaan Lahan.....	115
Gambar 4. 14 Aplikasi e-order dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	117
Gambar 4. 15 Matriks IE.....	127

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perhitungan SWOT

Lampiran 2 : Surat Selesai Penelitian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan

Lampiran 4 : LOA Jurnal DIA



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Urbanisasi perkotaan secara tidak langsung menyebabkan pertumbuhan permintaan perumahan yang besar. Urbanisasi ke perkotaan adalah usaha bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya sehingga pertumbuhan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menjadi hal yang tak terhindarkan. Dalam *The World Cities Report* (2020), UN-Habitat menunjukkan bahwa kota telah menjadi tujuan penghidupan bagi 55% populasi dunia, dan proporsi ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050.

Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah perkotaan membutuhkan perumahan dan permukiman. Namun tingginya kebutuhan akan hal tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sehingga kondisi tersebut menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkotaan. UN-Habitat (2018) mencatat sebanyak 1.033.546 juta jiwa tinggal di kawasan permukiman kumuh. Angka tersebut akan menjadi lebih besar lagi dimana pada tahun 2030, enam dari sepuluh orang di seluruh dunia diprediksi akan tinggal di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, UN-Habitat merekomendasikan perbaikan kawasan kumuh untuk menciptakan kota - kota yang layak huni dan produktif bagi penghuninya. Selain itu, meskipun telah banyak regulasi dan program untuk mengentaskan permukiman kumuh, hambatan-hambatan seringkali muncul sehingga implementasi kegiatan tidak selalu berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Kebijakan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh pemerintah seringkali tidak berhasil memenuhi kebutuhan penduduk karena kompleksitas berbagai kepentingan yang terlibat. Dalam proses perumusan kebijakan ini, diperlukan keterlibatan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah (Soesilowati, 2007).

Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, pada tahun 2025 diperkirakan memiliki 170,4 juta orang yang tinggal di daerah perkotaan, atau mencakup sekitar 59,3 % dari total penduduk Indonesia (*Worldometers, 2019*). Indonesia sendiri mengalami gelombang munculnya permukiman kumuh di daerah perkotaan, sedangkan data yang ada menunjukkan 29,92 juta jiwa orang tinggal di daerah kumuh perkotaan (*Laporan UN Habitat, 2020*).

Situasi ini perlu menjadikan penanganan permukiman kumuh sebagai prioritas agar menghentikan pertumbuhan luas permukiman kumuh. Walaupun tidak diinginkan, penting untuk mengakui bahwa keberadaan kawasan kumuh sulit dihindari dalam proses pengembangan wilayah dan kota. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dalam menangani berbagai aspek yang dapat menghambat timbulnya kawasan kumuh (*Mardhanie, 2013*).

Jakarta sebagai kawasan perkotaan inti dalam kawasan metropolitan Jabodetabekpunjur mempunyai peran sebagai pusat kegiatan – kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya (*Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2020*). Selain itu dengan lahirnya undang-undang terkait Provinsi Daerah Khusus Jakarta, fungsi Jakarta berubah menjadi pusat perekonomian nasional dan internasional, penghubung strategis dan vital dalam jaringan bisnis dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga perkotaan sekaligus mendorong kesejahteraan nasional (*Undang - Undang RI No 2 Tahun 2024*).

Namun, DKI Jakarta sebagai kota metropolitan dan pusat perekonomian Indonesia yang ramai, saat ini diklasifikasikan sebagai salah satu kota tidak layak huni di negara ini. Data terkini Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2023 menunjukkan, hanya 36,69% jumlah rumah di DKI Jakarta yang memiliki akses terhadap perumahan layak. Statistik ini menunjukkan bahwa hanya kurang dari separuh rumah tangga yang sudah memiliki perumahan layak huni. Selain itu Jakarta juga menghadapi permasalahan kepadatan penduduk dimana saat ini memiliki kepadatan 15.978 jiwa/km². Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penilaian buruk terhadap kota metropolitan Jakarta.

Dalam upaya mengatasi permasalahan perumahan yang terjangkau, Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan program yang menyediakan perumahan tanpa memerlukan uang muka bagi penghuninya. Sayangnya, progres pembangunan yang ada hanya mencapai 912 unit dari target semula 2.515 unit, atau dengan kata lain 63,74 % belum dapat dicapai. Hal ini menunjukkan upaya pengentasan permasalahan perumahan bersubsidi (MBR) belum membuahkan hasil yang diharapkan, akibatnya masih banyak warga DKI Jakarta yang kekurangan perumahan layak (Rahman et al., 2023).

Kecamatan Tambora, dengan luas wilayah sebesar 5,4 km², dihuni oleh lebih dari 269.139 penduduk. Kecamatan Tambora dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa/km² menjadikan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di DKI Jakarta (BPS Jakarta Barat, 2023). Selain itu Kecamatan Tambora masuk ke dalam area miskin esktrim dengan jumlah rumah tidak layak huni dalam kategori tinggi sehingga bantuan bedah rumah sering menysasar pada wilayah Tambora (Wawancara Baznas, 2024). Kondisi urbanisasi dan migrasi masuk tergolong tinggi tercatat sebanyak 8.915 atau 3,3 % dari total jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan tempat tinggal meningkat (BPS Kecamatan Tambora, 2020).

Sebagian besar dari wilayah Tambora mengalami permasalahan dalam penataan fisik permukiman seperti kondisi akses jalan yang sempit, kepadatan bangunan yang tinggi, akses sinar matahari yang kurang dan sanitasi yang terbatas. Selain itu Tambora juga mengalami permasalahan sosial seperti kemiskinan, rendahnya angka pendidikan, kriminalitas, dan kerawanan kebakaran walaupun sudah masuk program penataan permukiman. Kondisi berbanding terbalik dimana dalam perencanaan tata ruang Kawasan Tambora diamanatkan untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman terpadu baik melalui pembangunan kembali dan perbaikan fungsi yang dilengkapi infrastruktur terintegrasi serta selaras dengan rencana tata ruang kawasan permukiman (Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2014).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan penataan permukiman telah menerbitkan peraturan Gubernur DKI Jakarta No 90 Tahun 2019 tentang program *Community Action Plan* (CAP) dan *Collaborative*

Implementation Program (CIP). Program tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, konsultan dan akademisi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh dalam menciptakan kawasan permukiman terpadu. Pada program tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas permukiman pada 445 Rukun Warga yang masih tergolong dalam kategori kumuh (RW Kumuh).

Community Action Plan (CAP) dan *Collaborative Implementation Program (CIP)* adalah dua inisiatif program yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki lingkungan di masyarakat kumuh. Program CAP dan CIP melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas permukiman untuk menciptakan penataan kawasan permukiman yang terpadu, sinergis, kolaboratif dan berkelanjutan dengan pendekatan penataan pada aspek fisik lingkungan, aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dan aspek pemberdayaan sosial budaya. Dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik secara terkoordinasi, kooperatif, berkelanjutan, dan terintegrasi perlu diatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 90 Tahun 2018). Hal ini juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 11, “menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan” atau “menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan”.

Dibandingkan dengan program lain di DKI Jakarta, penganggaran program CAP dan CIP cukup signifikan. Berdasarkan Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 terkait kegiatan CAP dan CIP, Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penataan 80 RW dengan anggaran program CAP sebesar 25,57 miliar dan CIP 558,8 miliar. Anggaran untuk 22 RW wilayah Jakarta Barat sebesar Rp 6,7 miliar untuk program CAP dan Rp131,637 miliar untuk CIP, jumlah ini mencakup biaya fasilitator, konsultan, dan surveyor. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya program, penganggaran akan terus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan (KUA-PPAS, 2020).

Program CAP dan CIP juga telah diklasifikasikan sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) oleh Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. Sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), KSD merupakan kegiatan strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian kebutuhan pokok, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat program CAP dan CIP merupakan program strategis Kepala Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta harus memprioritaskan CAP dan CIP serta merencanakan dan melakukan penganggaran setiap tahunnya.

Selain program CAP dan CIP, program dari inisiatif swasta dan institusi lainnya juga telah dilaksanakan di wilayah Tambora. Di antaranya program penghijauan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Kahaptex, program pembangunan rumah dan bansos dari Yayasan Budha Tzu Chi serta program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun program-program ini mempunyai beberapa kelemahan, termasuk anggaran yang terbatas, wilayah layanan yang berfokus pada area tertentu, dan penentuan bantuan oleh penyedia tanpa melibatkan masyarakat. Melihat hal tersebut Program CAP dan CIP dipilih untuk dilakukan penelitian karena memiliki beberapa kelebihan yaitu cakupan program yang luas, dampaknya yang besar, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penataan permukiman kumuh.

Pendekatan *collaborative governance* sangat sesuai dalam keberhasilan untuk jenis program yang berfokus pada kolaborasi dengan masyarakat yang melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. *Collaborative governance* adalah pendekatan baru untuk tata kelola pemerintahan yang mengumpulkan berbagai pemangku kebijakan di forum yang sama untuk mencapai kesepakatan (Ansell dan Gash, 2007:543). Hal yang sama dijelaskan oleh Holzer et al., (2012), yang menyatakan bahwa pemerintahan kolaboratif adalah ketika pihak-pihak publik dan swasta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut beberapa ahli, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan jaringan organisasi dari berbagai sektor dan masyarakat sipil.

Negosiasi, pengambilan keputusan kolektif, dan pencapaian kesepakatan melalui interaksi formal dan informal adalah bagian dari proses ini. Selain itu, pembuatan dan pengembangan standar yang dapat memberikan keuntungan pada pihak-pihak yang bekerjasama merupakan bagian dari manajemen kolaboratif. Dengan demikian, dalam kerja sama ini, interaksi di antara semua pihak bersifat egaliter, di mana setiap aktor memiliki posisi yang sama. Secara keseluruhan, *collaborative governance* merupakan pendekatan di mana pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak lain secara langsung dalam proses pengambilan keputusan publik, dengan tujuan mencapai hasil yang inklusif dan partisipatif.

Dalam buku “*Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*” (2020 : hal 47) dari (Ansell & Gash, 2008) diketahui bahwa kolaborasi yang ideal memiliki parameter diantaranya adanya aktor - aktor kebijakan di luar pemerintahan yang terlibat pada proses kebijakan, adanya forum di mana sebagian wewenang berada di tangan lembaga publik, adanya *policies* yang disepakati berdasarkan kesepakatan, dan adanya tujuan yang tepat untuk hasil yang dinegosiasikan bersama. Dengan mempertimbangkan parameter yang disebutkan di atas, masih ada beberapa kendala yang menghalangi keberhasilan pelaksanaan *Collaborative Governance* pada Program CAP dan CIP. Salah satunya adalah kurangnya kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan program, pelaksanaan program CAP dan CIP masih berfokus pada perbaikan fisik sarana dan prasarana dan masih sedikit menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dan aspek pemberdayaan sosial budaya, masih minimnya kemitraan antar pemerintah, masyarakat, akademisi dan badan usaha dan belum semua pihak yang berkepentingan terlibat secara aktif dan setara dalam setiap tahap proses penataan permukiman. Selain itu masih rendahnya proporsi keaktifan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program CAP dan CIP. Seperti mengutip penjelasan KI I:

“Kalo tingkat pelibatan masyarakat masih sangat sedikit, ditinjau dari proporsi anggaran masih dari APBD. Jadi masyarakat tidak partisipasi anggaran, masyarakat hanya menerima program saja. Kolaborasi dan *action community* nya masih kurang, misalkan masyarakat ada rencana program disitu dan anggarannya dari sponsor atau CSR, kalo seperti itu ada tingkat partisipasi. Ada konsultan ditugaskan disitu kemudian masyarakat misalnya

mengusulkan kegiatan pos RW, saluran, jalan dll, jadi ada hubungan ke atas dan ke bawah tapi tidak dominan. Jadi konsultan menampung aspirasi dari masyarakat (*shopping list*), namun bagian yang detail belum bisa dilakukan oleh konsultan, seperti usulan MCK komunal setelah menjadi identifikasi usulan tanahnya bukan milik pemda dan tidak bisa dibuat lokasi MCK komunal. Perencanaan dari CAP seharusnya jadi di CIP, namun masih ada yang tidak sesuai” (Wawancara 19 Januari 2024)

Melihat kondisi pelaksanaan CAP dan CIP yang belum sepenuhnya terealisasi dengan baik dan masih mengalami berbagai permasalahan baik koordinasi dan pelaksanaan program CAP dan CIP yang belum optimal, oleh karena itu strategi tata kelola kolaboratif sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi program CAP dan CIP dalam menghasilkan hasil yang berdampak nyata serta memastikan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses untuk memperbaiki kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa perlu merumuskan strategi *Collaborative Governance* untuk meningkatkan tata kelola kawasan permukiman kumuh melalui program CAP dan CIP di kawasan Tambora, Provinsi DKI Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang dapat ditemui dalam *Collaborative Governance* dalam penataan permukiman kumuh di kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta diantaranya:

- Masih rendahnya peran aktif masyarakat dan belum meratanya partisipasi aktif masyarakat dalam program CAP dan CIP sehingga terdapat resistensi terhadap perubahan dalam penataan permukiman
- Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, akademisi dan badan usaha sehingga menghambat sinergi dan penggunaan sumber daya yang optimal
- Tidak adanya organisasi besar seperti NGO yang terlibat secara aktif dalam penataan permukiman kumuh mengakibatkan kekurangan sumber daya, dukungan teknis, dan akses ke jaringan yang lebih luas

- Pelaksanaan program CAP dan CIP masih berfokus pada perbaikan fisik sarana dan prasarana dan masih sedikit menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat dan aspek pemberdayaan sosial budaya mengakibatkan hasil yang tidak komprehensif

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian strategi kolaborasi pemerintahan dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Mengapa *collaborative governance* dalam penataan permukiman kumuh di kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta belum optimal?
2. Strategi apakah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran *collaborative governance* dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor - faktor yang menyebabkan peran *collaborative governance* dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta belum optimal.
2. Menyusun strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran *collaborative governance* dalam penataan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peran kolaboratif pemerintahan melalui program CAP dan CIP dalam pengelolaan permukiman kumuh. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan atau *overview* bagi pelaksanaan kegiatan yang akan menerapkan konsep serupa.

2. Untuk ilmu pengetahuan, dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen pembangunan daerah dan memberikan kontribusi pemikiran, data, informasi, dan strategi konseptual yang berguna untuk memperluas pengetahuan tentang bidang tersebut. Literatur tentang kolaborasi pemerintahan melalui program CAP dan CIP juga dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis.
3. Bagi Masyarakat, untuk memberikan *knowledge* kepada warga masyarakat agar dapat berperan aktif melalui program CAP dan CIP dalam penataan permukiman kumuh bersama pemerintah dan non pemerintah sebagai bentuk penyelesaian penataan kawasan permukiman kumuh di Kawasan Tambora Provinsi DKI Jakarta.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, simpulan yang dapat diambil dalam strategi *collaborative governance* dalam penataan kumuh melalui program CAP dan CIP di Kawasan Tambora sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya *collaborative governance* dalam penataan kumuh melalui program CAP dan CIP di kawasan Tambora disebabkan oleh beberapa faktor yang belum berkinerja dengan baik, yaitu faktor tata kelola pemerintah, faktor komitmen terhadap tujuan, faktor akses terhadap sumberdaya dan faktor partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor yang masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan kolaborasi yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sehingga kedepannya diperlukan langkah-langkah strategi untuk mengatasi dari faktor-faktor yang masih kurang baik dan meningkatkan kualitas dari faktor yang sudah baik dalam pelaksanaan kolaborasi.
2. Strategi yang dirumuskan dalam optimalisasi *collaborative governance* dalam penataan permukiman kumuh kawasan permukiman Tambora dan berdasarkan urutan prioritas dari hasil *Quantitative Strategic Planing Matrix*, sebagai berikut:
 - a. Mengadakan kemitraan strategis antar stakeholders baik pemerintah, akademisi, badan usaha, NGO dan masyarakat
 - b. Melakukan integrasi kebijakan terkait seperti konsolidasi lahan dan pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan CAP dan CIP
 - c. Menerapkan dukungan politik yang mendorong pelaksanaan CAP dan CIP di Kawasan Tambora
 - d. Mengadakan bimbingan teknis/pelatihan internal Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan kelompok masyarakat untuk sosialisasi CAP dan CIP

- e. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan dengan menyusun perencanaan program CAP dan CIP yang lebih terukur baik waktu, sumberdaya dan pendanaan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran berupa *action plan* untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya kolaboratif penataan permukiman kumuh kawasan permukiman Tambora dengan mendorong faktor yang belum berkinerja baik dan jangka waktu pelaksanaan dari strategi yang dirumuskan. Beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Aspek yang perlu didorong dalam penataan permukiman kumuh:
 - a. Aspek Tata Kelola Pemerintah
 - Pemerintah Provinsi DKI melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong kerjasama antar dinas mengadakan forum dengan melibatkan Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara periodik 1 bulan sekali untuk koordinasi pelaksanaan CIP termasuk penganggaran dan mekanisme pelaksanaan. Hal ini sesuai amanat dari Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.
 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Setda Provinsi DKI Jakarta menjalin kemitraan dengan NGO yang memiliki perhatian di bidang pemberdayaan masyarakat dan penataan permukiman kumuh dan melaksanakan program bersama. Kemitraan dengan pihak ketiga tersebut dikuatkan dengan penetapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan melalui MOU atau Perjanjian Kerjasama yang mengatur kewenangan dan kewajiban pihak-pihak yang bekerjasama.
 - Pemerintah Provinsi DKI melalui Gubernur melakukan penguatan kelembagaan di Kota Administrasi Jakarta Barat agar pelaksanaan CAP dan CIP berjalan optimal. Penguatan peran Wali Kota Jakarta

Barat dilakukan untuk mengintegrasikan pembangunan yang mengutamakan keterpaduan dan keberlanjutan sesuai amanat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan.

b. Aspek Komitmen Terhadap Tujuan

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta menjalin kerjasama dengan universitas dan akademisi pada jurusan perencanaan wilayah dan kota, arsitektur dan teknik sipil dengan kegiatan berupa penyusunan tema atau design pengembangan kawasan. Kerjasama tersebut diikat melalui MOU atau PKS sehingga pemerintah provinsi DKI terbantu dan pihak universitas dapat mengadakan penelitian aksi melalui program CAP dan CIP.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk melakukan pengkajian pembaharuan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dalam Kerangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu dengan menyusun program lanjutan penataan permukiman mengingat pelaksanaan Program yang akan selesai sekaligus sebagai keberlanjutan dari program CAP dan CIP.

c. Aspek akses terhadap Sumberdaya

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas CKTRP Provinsi DKI mengupayakan penyediaan lahan untuk pembangunan sesuai kebutuhan dalam rencana kegiatan CAP dan CIP guna mengurangi kondisi kumuh dan meningkatkan perbaikan pada permukiman kumuh tersebut.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Dinas CKTRP menyusun *pilot project* dalam penyediaan perumahan dengan memanfaatkan teknologi pembangunan yang ramah lingkungan dan mengutamakan sumber daya lokal yang aman bagi

lingkungan di Tambora sehingga memberikan dampak signifikan terhadap penanganan permukiman kumuh Tambora.

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penyebaran informasi melalui kegiatan kampanye melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website, dan media massa dan publikasi menyebarkan publikasi seperti brosur, pamflet, dan buku panduan yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan cara berpartisipasi dalam program CAP dan CIP.

d. Aspek Partisipasi Masyarakat

- Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas PRKP dan Dinas Sosial membentuk forum koordinasi yang melakukan kegiatan 2 bulan sekali dengan melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas) dan kelompok masyarakat yang sudah terbentuk seperti Kelompok Karang Taruna, FKDM dan PKK. Forum koordinasi tersebut sebagai edukasi terkait kesadaran lingkungan dan peningkatan kapasitas anggota kelompok masyarakat. Penguatan Pokmas dapat dilakukan dengan ditetapkan ke SK Tim melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengkoordinir Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan bimbingan teknis aspek pemberdayaan sosial budaya kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan tata boga, keahlian komputer, pendampingan untuk kejar program pendidikan paket A, B dan penyuluhan bidang kesehatan.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengkoordinir Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan bimbingan teknis aspek pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan wirausaha pada bidang kuliner, tata rias, konveksi, sablon dan komputer, pendampingan usaha produktif, pembentukan

koperasi simpan pinjam, dan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PRKP dan Badan Pengelola Keuangan Daerah memberikan insentif dan penghargaan kepada warga yang aktif berpartisipasi dalam program dan penghargaan komunitas kepada kelompok atau individu yang memberikan kontribusi luar biasa dalam mengurangi kekumuhan pada lingkungan huniannya.

2. Berdasarkan strategi yang dirumuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu untuk menyusun jangka waktu pelaksanaan yang terbagi menjadi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun strategi yang dilakukan dalam jangka pendek yaitu mengadakan kemitraan strategis antar stakeholders baik pemerintah, akademisi, badan usaha, NGO dan masyarakat. Sedangkan strategi untuk jangka menengah yaitu melakukan integrasi kebijakan terkait seperti konsolidasi lahan dan pelibatan pemangku kepentingan dan menerapkan dukungan politik yang mendorong pelaksanaan CAP dan CIP di Kawasan Tambora. Selanjutnya untuk jangka panjang dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis internal Dinas PRKP Provinsi DKI Jakarta dan bimtek kepada masyarakat terkait tiga aspek yaitu penataan lingkungan, pemberdayaan sosial budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Simultan dengan hal tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi terkait penyesuaian pelaksanaan dan keberlanjutan program CAP dan CIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, K. L., Entwisle, D. R., & Olson, L. S. (2001). *Schools, achievement, and inequality: A seasonal perspective*. Educational Evaluation and Policy Analysis.
- Anderson, E.T. & J. McFarlane. (2004). *Community as Partner Theory and Practice in Nursing*. 4th Ed. Philadelphia.
- Angel, A., & Nasution, M. A. (2023). *Kolaborasi Pemerintah Dengan Stakeholders Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Belawan Sicanang Kota Medan*. Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 18,.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Kebijakan Dan Manajemen Publik.
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perpektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (ed.)). Program Studi Doktor Adminstrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press.
- BPS. (2023). *Statistik Kriminal*. Badan Pusat Statistik.
- BPS Kecamatan Tambora. (2020). *Kecamatan Tambora Dalam Angka 2020*.
- BPS Kecamatan Tambora. (2023). *Kecamatan Tambora Dalam Angka 2023*.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). *The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature*. Public Administration Review.
- Castells, M. (2004). *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Chandran, R. (2021). *FEATURE-Thai low-cost housing plan puts slum dwellers in charge*. Thomson Reuters Foundation.
- Creswell, J. (2008). *Penelitian pendidikan: Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- David, F. R., & David, F. R. (2016). *Manajemen Strategik : Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*, (Edisi 15,).
- Denzin, & Lincoln. (2009). *Handbook of Qualitative Research* : In Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- DeSeve, G. E., & Moore, M. H. (2009). (2009). *Collaborative Governance: How Government Can Engage Citizens and Stakeholders in Solving Public Problems*. IBM Center for The Business of Government.
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Graha Ilmu.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). *Research and Theory*.
- Fitriana, B. M. (2017). *Kolaborasi Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui*

- Perogram Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017*. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5(2), 1–17.
- Frank J Goodnow. (1990). *Politics and Administration: Study in Goverment*. The Mac. Millan Co., New York.
- H.S Shylendra (2007:217). (n.d.). *Governance Reform in a Globalizing World: Perspectives from India*. Sage Publications.
- Hadari Nawawi. (1984). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hartono, J. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 2007. BPFE. Yogyakarta.
- Hastuti, D. M. (2020). *Proses Colaborative Governance dalam Penanganan Lingkungan Kumuh Perkotaan (Studi Pada Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Program Kota Tanpa Kumuh Kabupaten Ponorogo)*. Ji@P Vol 9 No.2.
- Holzer, Marc, & Et.al. (2012). Holzer, Marc, et.al. *An Analysis of Collaborative Governance Models The Context of Shared Services*. Dalam Laurer Schachter, Hindy Kaif (*The State of Citizen Participation in America*), PP (349:386) Charlotte: Information Age Publishing.
- Humas PUPR. (2018). *Krueng Daroy : Contoh Baik Program Kolaborasi Penataan Kawasan Kumuh di Banda Aceh*. Diakses pada 6 September 2023, dari <https://pu.go.id/berita/krueng-daroy-contoh-baik-program-kolaborasi-penataan-kawasan-kumuh-di-banda-aceh>. 2018.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Irawati, R., Berliantoro, M., A, I. M., & Rahayu, N. S. (2023). *Community Evaluation Of Action Plan (CAP) In Slum Settlement Arrangement In Villages Kedaung Kaliangke West Jakarta*. 5, 280–291.
- Katoppo, M. L. (2021). *Desain sebagai Generator: Bagaimana Desain menjadi terang bagi semua orang*. Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial (SNDS).
- KUA-PPAS 2020. *Dokumen Rancangan Kebijakan Umum APBD-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020*.
- Lai, E. R. (2021). *Collaborative Governance in Practice: Theoretical and Practical Insights*. Routledge.
- Leigninger, M., & Nabatchi, T. (2015). *Public participation for 21st century democracy*. John Wiley and Sons.
- Lindeke, L., Sieckert, A. M. (2005). *Nurse-Physician Workplace Collaboration*. Online Journal of Issues in Nursing.
- M. Safi'i. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi*. Averroes Press.
- Mardhanie, A. B. (2013). *Penelitian Pemetaan Kawasan Kumuh Permukiman Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan*. Jurnal Inersia, Vol 5.

- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value : Strategic Management in Goverment*. In Harvard University Press.
- Muharam, R. S., Taryono, O., Maasir, L., & M, S. W. (2021). *Policy Networks in Improving the Quality of Housing and Settlements in Indonesia (A Case Research of Bandung District)*. Indonesian Scholars Scientific Summit Taiwan Proceeding, 3.
- Muslim, A., & Kurniawan, T. (2020). *Community Action Plan (CAP) Dalam Penataan Kawasan Kumuh Dari Perspektif Good Urban Governance: Sebuah Tinjauan Literatur*. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan).
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Nurkencana, W. (1993). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Open Data Covid-19 Provinsi DKI Jakarta 2024. *Jakarta Tanggap Covid-19*.
- Ostrom, E., Gardner, R., & Walker, J. (1994). *Rules, Games, and Common-pool Resources*. University of Michigan Press.
- Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik* (Bandung)
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 90 Tahun 2018. (2018). *Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Permukiman Terpadu*.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2019. (2019). *Peraturan Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- Peraturan Presiden RI No. 60 Tahun 2020. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Dan Cianjur*.
- Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2014. *Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi*.
- Pergub DKI No. 31 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan*.
- Pergub DKI No. 4 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penguatan Peran Walikota/Bupati Dalam Fungsi Koordinasi Penataan Kawasan*.
- PP No 14 Tahun 2016. (2016). *Peraturan Pemerintah RI No 14 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman*.
- Rahman, F., Nurdin, N., & Asropi, A. (2023). *Implementasi Penyediaan Perumahan*

- Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Program Hunian Terjangkau Tanpa Uang Muka di DKI Jakarta*. Jurnal Pembangunan Reporter Satuharapan 18 Oktober 2019. *Warga Nantikan Janji Anies Bangun Kampung Aquarium*, Diakses pada 7 September 2023 dari <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/warga-nantikan-janji-anies-bangun-kampung-aquarium>. 18 Oktober 2019.
- Rhama Purna Jati Kompas. (2023.). *Sikap Cuek dan Apatis Jadi Celah Kejahatan di Tambora*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/21/sikap-cuek-dan-apatisk-jadi-celah-kejahatan-di-tambora>
- Rindrojono, M. (2013). *Slum Kajian Permukiman Kumuh Dalam Perspektif Spasial*.
- Soesilowati, E. (2007). *Housing and Settlement Policy for Urban Communities*. Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Dinamika, 16(1), hlm. 2.
- Sondang P. Siagian. (2004). *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sulaiman, A. L. (2021). *Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus : Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)*. Majalah Media Perencana, TCCO, 1995:52. (1995). *Community Action for the Environment: A Guide to Helping Your Community Go Green*. The TCCO, Conservation Council of Ontario.
- The World Cities Report. (2020). *Unpacking the Value of Sustainable Urbanization*.
- Timur, A. (2024). *Strategi Optimalisasi Mengurangi Pengangguran Terhadap Dampak Bonus Demografi di Kota Tangerang*.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration, and. Development*. London: MacMillan Press.
- UN-Habitat. (2018). *Country Annual Progress Report*, 2018.
- Undang - Undang RI No 2 Tahun 2024. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Undang - Undang DKJ No 2*.
- UU No. 1 Tahun 2011. (2011). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Wijaya, H. & H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar.
- Yin R K. (2009). Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods (4th Ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Zhang, G., Xu, K., Liu, Z., Huang, R., Li, B., & Wang, R. (2023). *Policy-based initiatives on promoting China's affordable housing: Challenges and opportunities*. Developments in the Built Environment, (December 2020).